

Jaringan sosial sopir mobil plat hitam yang diomprenkan di jalan jampea raya koja, Jakarta Utara

Nanang Avianto, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=74016&lokasi=lokal>

Abstrak

Tesis ini tentang kehidupan sopir mobil plat hitam yang diomprenkan yang mangkal di Jalan Jampea Raya, Koja, Jakarta Utara. Didalam kegiatannya meskipun merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas, namun mereka tetap bertahan untuk menjalankan kegiatan pengomprenkan mobil plat hitam tersebut. Untuk itu fokus didalam tesis ini adalah pola-pola hubungan sosial yang terjalin didalam kegiatan tersebut sehingga terbentuk suatu jaringan sosial.

Metode penelitian kualitatif dipilih dalam penelitian ini dengan tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara baik dengan pedoman maupun tidak dengan pedoman sehingga dapat mengetahui pola-pola hubungan sosial yang terjadi dalam kegiatan sopir-sopir mobil plat hitam yang diomprenkan dan untuk dapat mengetahui strategi mendapatkan pelanggan maupun strategi menghindari penindakan hukum oleh petugas dalam hal ini polisi lalu lintas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh sopir mobil plat hitam yang diomprenkan tersebut rata-rata merupakan masyarakat dengan status ekonomi lemah, dan dalam kegiatannya menjalin hubungan (hubungan: Pertemanan, perantaraan, patron klien, kekuatan) dengan pemilik mobil, kenek, sesama sopir mobil plat hitam yang diomprenkan, juru parkir, preman, konsumen/pengguna jasa, dan petugas polisi agar terhindar dari jeratan hukum, karena kegiatan pengomprenkan mobil plat hitam tersebut dilakukan demi mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Disamping itu karena adanya peluang untuk memenuhi kebutuhan akan adanya angkutan baik untuk angkutan barang maupun penumpang yang murah dan sesuai dengan keinginan konsumen.

Sikap petugas polisi di wilayah tersebut yang bertugas berdasarkan fungsi dan peranannya, dengan melihat situasi dan kondisi yang ada, lebih mengutamakan pelayanan keamanan daripada penegakan hukum. Sehingga kegiatan pengomprenkan mobil plat hitam dapat terus berjalan hingga sekarang. Disamping itu perundang-undangan yang ada yaitu PP No 43 Tahun 1993 masih ada pasal yang tidak selaras dengan UU No 14 Tahun 1992 yang menyangkut ketentuan tentang kendaraan angkutan umum.

Implikasi dari tesis ini adalah perlu adanya keterpaduan bagi pihak kepolisian dan instansi terkait dalam menangani permasalahan ini, agar kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat ekonomi lemah ini dapat berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada tanpa menimbulkan dampak negatif sebagai akibat meningkatnya angka pengangguran.